

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Profil Kepolisian Resort Kota Besar Semarang**

Polrestabes Semarang berdiri setelah Kepolisian Daerah Jawa Tengah melikuidasi lima Kepolisian Wilayah (Polwil) dan satu kepolisian wilayah kota besar (polwiltabes) yang ada di bawah naungannya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri No. Pol : Kep 15/XII/2009 pada tanggal 31 Desember 2009. Surat Keputusan Kapolri tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Jawa Tengah Nomor Sprin /190-193/I/2010 yang diberikan kepada Kapolwiltabes, Kapolwil, dan Kapolres agar segera melakukan likuidasi. Polwiltabes Semarang membawahi 7 (tujuh) Polres (Kepolisian Resort) yaitu Polresta Semarang Selatan, Polresta Semarang Barat, Polresta Semarang Timur, Polresta Semarang, Polresta Demak, Polres Salatiga, Polres Kendal.

Kini Polrestabes membawahi 14 Polsek dan 1 Polsek kawasan Pelabuhan dan Sekarang Polwiltabes Semarang resmi berubah nama menjadi Polrestabes Semarang yang berkedudukan di Jl. DR. Sutomo IV No. 19, Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50244<sup>20</sup>. Sebagaimana kantor kepolisian yang berada dibawah

---

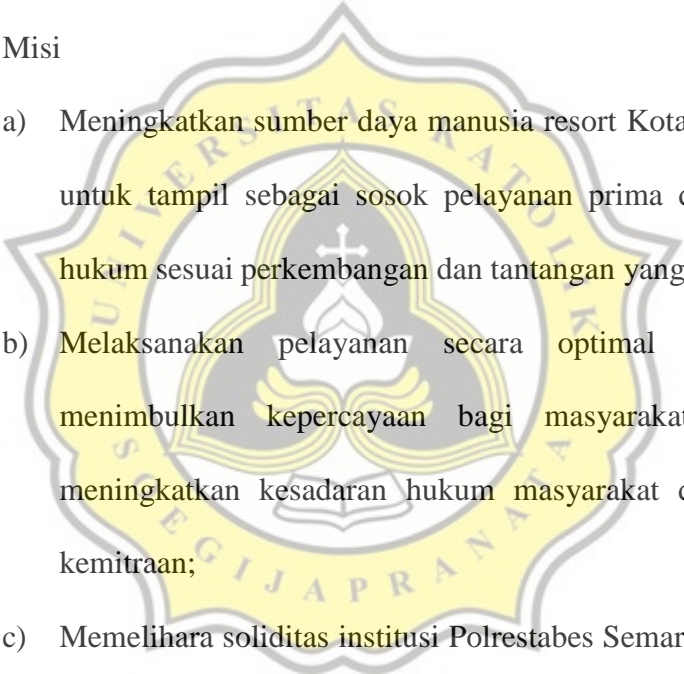
<sup>20</sup>Sejarah Polrestabes Semarang, online, internet, diakses pada 21 Februari 2021, pukul 12.00 WIB, <http://www.restabes-smg.jateng.polri.go.id/main/profile/sejarah.html>,

naungan Polri, maka untuk visi dan misi Polrestabes Semarang secara tegak lurus mengikuti visi dan misi Polri yang dapat diuraikan sebagai berikut<sup>21</sup>:

1. Visi

Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Semarang guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. Misi

- 
- a) Meningkatkan sumber daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi;
  - b) Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan;
  - c) Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi;
  - d) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya;
  - e) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan, profesional, dan transparan dengan

---

<sup>21</sup> *Visi dan Misi Polri*, online, internet, diakses pada 26 Februari 2021, pukul 21.00 WIB, <http://www.restabes-smg.jateng.polri.go.id/main/profile/visi.html>,

mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas;

- f) Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah;
- g) Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan;
- h) Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

Selain visi dan misi yang telah diterangkan di atas, Polrestabes Semarang juga memiliki beberapa fasilitas pendukung seperti ruang rapat ruang pemeriksaan, ruang pengaduan, ruang tahanan, ruang aula, ruang barang bukti, masjid, lapangan olahraga, dan klinik kesehatan. Berikut ini adalah Data dan Penyelesaian Perkara Laka Lantas Polrestabes Semarang Januari - Desember sebagai berikut :

	Bulan	JM L KE J	KORBAN				SELESAI			
			M	LB	LR	RUMAT	P 21	SP	Sp 3	Sp2
			D					3/77		hp

1	Januari	91	13	0	97	30.750.00 0	1	8	81	117
2	Februari	102	14	0	101	40.050.00 0	1	8	93	157
3	Maret	105	20	0	102	29.350.00 0	2	10	92	195
4	April	74	12	0	70	20.350.00 0	3	6	65	151
5	Mei	56	7	0	55	11.050.00 0	-	6	50	125
6	Juni	55	10	0	53	22.300.00 0	-	5	50	111
7	Juli	70	10	0	66	16.650.00 0	-	4	66	153
8	Agustus	79	15	0	74	41.900.00 0	-	9	69	187
9	September	89	15	0	89	64.450.00 0	1	8	79	184
10	Oktober	82	13	0	78	28.800.00 0	-	10	72	160
11	November	67	10	0	68	26.300.00 0	1	6	57	136

12	Desember	69	13	0	74	56.600.00	-	5	44	141
						0				
<b>JUMLAH</b>		<b>93</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>387.950.0</b>	<b>9</b>	<b>85</b>	<b>818</b>	<b>1.81</b>
		<b>9</b>	<b>2</b>		<b>8</b>	<b>00</b>				<b>7</b>

Keterangan :

JML KEJ : Jumlah Kejadian

MD : Meninggal Dunia

LB : Luka Berat

LR : Luka Ringan

RUMAT : Kerugian Materi

P 21 : Penyelesaian Perkara di Pengadilan

SP3/77 : Kasus yang dihentikan karena Korban meninggal

SP3 : Penyelesaian Kasus di Luar Pengadilan

SP2HP : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil

Berdasarkan data dalam table tersebut di atas, terdapat jumlah kasus perkara kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang yang diselesaikan di luar pengadilan yaitu melalui mekanisme mediasi sebanyak 818 (delapan ratus delapan belas) perkara.

## **B. Proses Mediasi dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polrestabes**

### **Semarang.**

#### **1. Kronologi Kasus**

Perkara kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan yaitu melalui mekanisme mediasi. Adanya hal tersebut Penulis menemukan perkara kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui mediasi. Perkara tersebut melibatkan dua orang pengendara kendaraan bermotor yang bernama Mochamad Ridwan dan Rizal Rizalino Wahyudi. Mochamad Ridwan adalah warga Semarang yang tinggal di Jl. Kumudasmoro Dalam, No. 11, RT 006 / RW 006, Kel. Bongsari, Kec. Semarang Barat, yang saat ini berusia 26 (dua puluh enam) tahun. Rizal Rizalino Wahyudi adalah warga Semarang yang tinggal di Perum POLRI Durenan Indah Blok RR, RT 08/ RW 06, Kel. Mangunharjo, Kec. Tembalang, yang saat ini berusia 23 (dua puluh tiga) tahun.

Mochamad Ridwan merupakan korban, sedangkan Rizal Rizalino Wahyudi merupakan pelaku perkara kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan Mochamad Ridwan mengalami kerugian dan luka yang cukup berat, seperti yang dinyatakan Mochamad Ridwan bahwa :

Pada saat mengalami kecelakaan lalu lintas saya tidak sadarkan diri, karena mungkin benturan yang keras dan langsung mengarah



ke kepala saya sehingga pada saat itu saya tidak sadar dan sudah ada di rumah sakit<sup>22</sup>.

Kecelakaan lalu lintas yang menimpa Mochamad Ridwan terjadi pada tanggal 5 November 2020, pukul 08.00 WIB, di perempatan Jl. Imam Bonjol Kota Semarang. Menurut Mochamad Ridwan kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena :

Ada seseorang yang menerobos rambu-rambu lalu lintas, dan pada saat itu Saya sedang melaju cukup cepat karena mau ada interview pekerjaan, sehingga saya tidak sempat untuk mengerem sepeda motor saya dan akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut<sup>23</sup>.

Adanya pernyataan tersebut di atas merupakan salah satu perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Semarang. Perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan yaitu dengan mekanisme mediasi. Mediasi dilakukan agar tercapainya suatu keadilan dengan tujuan korban tidak merasa dirugikan dengan adanya kesepakatan dengan pelaku kecelakaan lalu lintas tersebut, seperti yang dinyatakan oleh Rizal Rizalino Wahyudi bahwa :

Saya memilih untuk menyelesaikan perkara kecelakaan ini dengan cara mediasi. Menurut saya hal ini merupakan keputusan yang tepat karena apabila perkara tersebut diselesaikan melalui pengadilan maka akan sangat menyita waktu dan barang bukti yang ditahan untuk kepentingan penyidikan akan ditahan dan tidak dapat saya gunakan untuk aktifitas saya sehari-hari. Sehingga adanya mekanisme penyelesaian tersebut, selama pihak

---

<sup>22</sup> Wawancara Mochamad Ridwan, 26 tahun, Korban Kecelakaan Lalu Lintas, pada tanggal 13 Januari, Pukul 14.00 WIB.

<sup>23</sup> Wawancara Mochamad Ridwan, 26 tahun, Korban Kecelakaan Lalu Lintas, pada tanggal 13 Januari, Pukul 14.00 WIB.

pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya menurut saya sudah cukup dan tidak perlu diperpanjang lagi<sup>24</sup>.

Jadi dengan adanya hal tersebut maka proses pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan dapat dilakukan dengan mekanisme mediasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak yaitu antara korban dan pelaku, kemudian pada saat dipertemukan, korban diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memilih apakah perkara tersebut akan diselesaikan di pengadilan atau tidak. Setelah korban sepakat untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan, maka pihak korban memiliki hak untuk meminta ganti rugi kepada pelaku yang menyebabkan kerugian terhadap dirinya.

Adanya hal tersebut di atas menunjukkan bahwa Rizal Rizalino Wahyudi telah lalai dengan menerobos rambu-rambu sehingga menyebabkan Mochamad Ridwan tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan kendaraannya, sehingga kecelakaan lalu lintas tidak dapat dihindarkan. Kemudian dengan adanya permasalahan tersebut, Mochamad Ridwan mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat, dan kendaraan bermotor pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas tersebut dibawa ke kantor kepolisian unit satlantas polrestabes semarang yang beralamat di Jl. Ronggolawe Selatan, Kel. Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.

---

<sup>24</sup> Wawancara Rizal Rizalino Wahyudi, 23 tahun, Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas, pada tanggal 13 Januari, Pukul 14.00 WIB.



## 2. Proses Mediasi

Kecelakaan lalu lintas di jalan yang menyebabkan kerugian terhadap korban, pada dasarnya dapat diselesaikan secara musyawarah antara korban dengan pelaku atau tersangka seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Namun, hal tersebut dapat terjadi apabila berdasarkan kesepakatan yang dibuat antara korban dengan pelaku atau tersangka kecelakaan lalu lintas, yang mana telah disepakati bentuk ganti kerugian atau kompensasi kepada pihak yang menjadi korban. Adanya hal tersebut maka korban telah merasa ada keadilan dan kemanfaatan yang diperoleh dibandingkan dengan harus mengikuti kegiatan persidangan yang tentu saja akan berlangsung lama sehingga menyita waktu korban.

Penyidik dalam hal ini sebenarnya dapat melakukan mediasi melalui perdamaian antara korban dan tersangka pada perkara kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

Untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Kemudian dalam ayat (2) juga menyatakan bahwa :

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri memiliki kewenangan untuk menghentikan atau tetap melanjutkan suatu perkara dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Kewenangan ini dikenal dengan diskresi kepolisian yang menjadi pintu masuk bagi Polri dalam melakukan mediasi terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian terhadap korban.

Pelaksanaan penegakan hukum, seringkali dilakukan upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan atau sering dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Salah satu jenis ADR yang mulai dikembangkan dalam hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi atau diluar pengadilan ini telah dikenal sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Surat Kapolri ini menyatakan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan dari para pihak baik korban maupun tersangka, tetapi apabila tidak terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak maka tetap diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Perkara kecelakaan lalu lintas yang karena kealpaanya menyebabkan kerugian bagi orang lain seperti luka ringan, luka berat,

mapun menyebabkan korban meninggal dunia merupakan salah satu tindak pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan :

Pasal 359 :

Barangsiapa karena kealpaanya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360 ayat (1) :

Barangsiapa karena kealpaanya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360 ayat (2) :

Barangsiapa karena kealpaanya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

Adanya peraturan tersebut dapat diketahui apabila seseorang karena kealpaanya menyebabkan orang lain meninggal dunia, luka berat, dan luka ringan dapat dikenakan sanksi pidana seperti dalam peraturan di atas. Tetapi dalam konteks kecelakaan lalu lintas harus memperhatikan asas *Lex specialis derogat legi generalis* yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) yang menyatakan “Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.” Jadi dengan adanya hal tersebut untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Pasal 229 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa jenis kecelakaan lalu lintas dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, kecelakaan lalu lintas berat. Menurut Yunanto menyatakan bahwa “Kasus kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian dapat melakukan penyelesaian melalui mekanisme mediasi”<sup>25</sup>. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Sigit selaku Kasat Lantas yang menyatakan bahwa :

Unit Lantas Polrestabes Semarang menerapkan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian terhadap korban dengan cara mediasi atau musyawarah untuk tercapainya kesepakatan dari kedua belah pihak<sup>26</sup>.

Jadi dengan adanya hal tersebut maka penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dapat diselesaikan dengan mekanisme di luar pengadilan yaitu dengan cara mediasi guna tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi hal tersebut dapat dilakukan apabila kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan menggunakan mekanisme tersebut.

Kecelakaan lalu lintas yang mana korban mengalami kerugian dan hanya mengalami luka ringan, maka mekanisme mediasi dapat dilakukan dengan syarat adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, seperti yang dinyatakan oleh Sigit bahwa :

Pelaksanaan mediasi akan dilakukan setelah adanya kesepakatan antara korban dan tersangka atau pelaku. Hal tersebut sangat

---

<sup>25</sup> Wawancara Yunanto, Kanit Lantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 12 Januari, Pukul 11.15 WIB.

<sup>26</sup> Wawancara Sigit, Kasat Lantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 12 Januari, Pukul 13.15 WIB.

efektif dilakukan karena masing-masing pihak telah mendapatkan keadilan dan kemanfaatan dari penyelesaian perkaranya tersebut, serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan mekanisme penyelesaian tersebut<sup>27</sup>.

Adanya pernyataan tersebut Yunanto juga menyatakan bahwa :

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan kerugian material akan lebih efektif bila diselesaikan pada tingkat penyidikan, selain memberi manfaat bagi korban dan tersangka, penyelesaian ini juga meringankan tugas penyidik karena kasus tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya<sup>28</sup>.

Perdamaian kedua pihak yang berperkara merupakan syarat utama dalam penyelesaian perkara melalui mediasi.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dapat dilihat terlebih dahulu pada kondisi korban, apakah mengalami luka ringan atau luka berat maupun meninggal dunia, sehingga korban juga memiliki peran yang penting untuk memilih mekanisme mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selain itu, alasan lain pihak pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas menyelesaikan perkara tersebut di luar pengadilan atau dalam mekanisme mediasi adalah karena waktu yang cenderung lebih cepat dan barang bukti yang disita dapat segera diambil dan untuk digunakan kembali.

Jadi dengan adanya hal tersebut maka proses pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan dapat dilakukan dengan mekanisme mediasi. Proses mediasi dilakukan dengan cara sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> Wawancara Sigit, Kasat Lantas Polrestaes Semarang, pada tanggal 12 Januari, Pukul 13.15 WIB.

<sup>28</sup> Wawancara Yunanto, Kanit Lantas Polrestaes Semarang, pada tanggal 12 Januari, Pukul 11.15 WIB.



a. Menghadirkan mediator.

Adanya mediator berfungsi sebagai pihak yang menengahi perselisihan antara korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas, dalam hal ini adalah pihak kepolisian. Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa :

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Adanya peraturan tersebut, yang dimaksud dengan mediator merupakan pihak yang tidak memihak sehingga tidak memiliki kepentingan terkait dengan permasalahan para pihak, yang mana diharapkan dalam menjalankan tugasnya mediator dapat bersifat netral dalam membantu pihak yang bersengketa.

Pada proses ini mediator yaitu kepolisian memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi serta apa yang diharapkan kedua pihak dalam menyelesaikan perkara tersebut. Kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai mediator memiliki kewenangan untuk mengontrol proses mediasi dari awal hingga akhir, dan mempersiapkan jadwal pertemuan antara kedua pihak, serta membuat perjanjian



perdamaian antara pelaku dan korban sebagai dasar perdamaian antara kedua belah pihak.

b. Mempertemukan kedua belah pihak.

Kedua belah pihak yang dipertemukan adalah korban dan pelaku, kemudian pada saat dipertemukan, korban diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memilih apakah perkara tersebut akan diselesaikan di pengadilan atau tidak. Setelah korban sepakat untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan, maka pihak korban memiliki hak untuk meminta ganti rugi kepada pelaku yang menyebabkan kerugian terhadap dirinya. Pada saat dipertemukan korban diwakili oleh ibu kandungnya karena pada saat itu korban sedang dalam masa perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan tersebut.

Ketika dipertemukan pihak korban dan pelaku mendapatkan peran yang sama yaitu menentukan apakah perkara tersebut akan diselesaikan hanya melalui mediasi atau akan diteruskan dan diputuskan di pengadilan. Pada saat itu peran mediator yaitu kepolisian pada saat mempertemukan kedua belah pihak memberikan pendapatnya terkait dengan keuntungan-keuntungan apabila permasalahan tersebut diselesaikan melalui mekanisme

mediasi. Sehingga dengan adanya hal tersebut korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas bisa sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme mediasi, dan semua pihak diuntungkan dengan adanya hal tersebut.

c. Membuat surat kesepakatan perdamaian.

Setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak maka para pihak harus membuat surat kesepakatan perdamaian sebagai bukti bahwa mereka sudah bersepakat untuk berdamai cukup dengan mekanisme mediasi. Surat kesepakatan perdamaian merupakan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berperkara khususnya perkara kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang yang sifatnya mengikat pihak yang bersepakat. Jadi dengan adanya surat kesepakatan perdamaian tersebut menjadikan dasar bahwa kedua belah pihak telah sepakat dengan solusi-solusi yang ditawarkan, seperti ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Selain itu dengan adanya kesepakatan tersebut kepolisian juga dimudahkan karena tidak perlu melanjutkan perkara tersebut ke tahap berikutnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya mekanisme mediasi dapat meringankan biaya, mempersingkat waktu, dan menjaga hubungan antara pelaku dan korban karena mencapai solusi yang telah disepakati bersama seperti yang

dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa :

Jika Mediasi berhasil mencapai kesepakatan, Para Pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

d. Pencabutan berkas laporan.

Apabila surat kesepakatan perdamaian sudah dibuat dan disetujui oleh kedua pihak, maka surat kesepakatan tersebut dapat diberikan kepada polisi yang menangani perkara tersebut. Surat kesepakatan perdamaian menjadi dasar untuk mencabut laporan, yang mana dengan adanya surat tersebut maka perkara tersebut sudah selesai dan tidak perlu untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Pada dasarnya pencabutan berkas laporan dilakukan oleh pihak yang melaporkan kepada Kepala Kepolisian Polrestabes Kota Semarang agar perkara tersebut ditutup dan tidak dilanjutkan.

Proses pencabutan laporan dapat dilakukan pada saat terjadinya perkara, tahap penyidikan, pemeriksaan berkas perkara, dan pemeriksaan di persidangan. Jadi dengan adanya hal tersebut, pencabutan berkas laporan dapat dilakukan kapan saja selama para pihak sepakat untuk

berdamai dan tidak melanjutkan perkara tersebut ke tahap berikutnya. Akibat hukum yang akan timbul apabila berkas perkara dicabut adalah penuntutan yang dilakukan menjadi batal. Menurut Sigit bahwa :

Pada umumnya pencabutan berkas perkara hanya dapat dilakukan pada delik aduan, namun seiring berkembangnya zaman, praktik pencabutan laporan dapat dilakukan pada delik aduan maupun delik biasa, selama memenuhi rasa keadilan para pihak yang berperkara<sup>29</sup>.

Sehubungan dengan hal tersebut Yunanto juga menyatakan bahwa :

Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh penyidik Satlantas Polrestabes Semarang dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, baik aspek korban maupun tersangka yang telah bersepakat untuk menyelesaikan kasus tersebut hanya pada tingkat penyidikan dan tidak melanjutkan pada tahapan selanjutnya<sup>30</sup>.

Penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian dapat melakukan tindakan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri telah memberikan kewenangan kepada Polisi Republik Indonesia untuk melakukan diskresi kepolisian. Diskresi merupakan kebijakan dari pejabat negara yang memperbolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, dengan tiga syarat, yaitu demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik.

---

<sup>29</sup> Wawancara Sigit, Kasat Lantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 12 Januari, Pukul 13.15 WIB.

<sup>30</sup> Wawancara Yunanto, Kanit Lantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 12 Januari, Pukul 11.15 WIB.

Adanya hal tersebut juga dapat diketahui dalam Pasal 18 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang menyatakan

:

Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa :

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Polri.

Pengertian ”bertindak menurut penilaiannya sendiri”, dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat dan risiko serta biaya dan keuntungan dari tindakannya yang benar-benar untuk kepentingan umum.

Selain kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, penyidik di dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga diberikan kewenangan untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu merupakan tindakan dari kepolisian untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan syarat tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut

dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka menjalankan tugas, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menghentikan penyidikan seperti yang dapat diketahui dalam Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) disebutkan bahwa :

Penyidik dapat menghentikan penyidikan karena: (1) tidak terdapat cukup bukti, (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau (3) penyidikan dihentikan demi hukum.

Adanya peraturan tersebut di atas, maka penyidik untuk menghentikan penyidikan dapat melakukan pemberitahuan kepada penuntut umum, tersangka, maupun keluarganya. Selain itu juga perlu dipikirkan mengenai konsep tentang bagaimana penghentian penyidikan atas dasar diskresi.

Maka dengan adanya uraian sebagaimana disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa belum ada kejelasan dan ketegasan mengenai batasan diskresi kepolisian seperti yang dinyatakan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa :

- 1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;



- 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Polisi Republik Indonesia selaku penegak hukum bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam melaksanakan tugas penegakan hukum harus menerapkan asas legalitas sebagai konsekuensi dari negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia. Diskresi kepolisian kaitannya dengan ide keadilan restoratif (restorative justice) dan diskresi (discretion), merupakan pintu gerbang bagi penyidik untuk menerapkan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa terhadap perkara kecelakaan lalu lintas, dengan demikian diskresi kepolisian yang dimiliki oleh penyidik merupakan sumber inspirasi terkait dengan diterapkannya mediasi pada tahap penyidikan oleh penyidik untuk menciptakan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara khususnya perkara kecelakaan lalu lintas.

### **C. Hambatan dalam pelaksanaan Mediasi.**

Pelaksanaan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan melalui mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang, dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan dari para pihak yang telah sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut pada tahap penyidikan, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke upaya-upaya hukum selanjutnya yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Penegakan hukum pada awalnya bertujuan untuk memberikan efek jera

kepada pelaku tindak pidana atau yang dikenal dengan *retributive justice*, kemudian bergerak kepada konsep keadilan restorative (*restorative justice*). Restorative justice merupakan sistem pengembalian konflik kepada pihak-pihak yang berperkara dalam hal ini perkara kecelakaan lalu lintas, yaitu meliputi korban dan pelaku untuk mengutamakan kepentingan-kepentingan para pihak yang berperkara. Konsep keadilan restoratif ini kemudian diterapkan dengan mediasi yang dilakukan dalam Sistem Peradilan Pidana guna mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara. Suyud Margono, menyatakan bahwa mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan;
- b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam perundingan;
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian;
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung;
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa<sup>31</sup>.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian, dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan. Menurut Yunanto pelaksanaan mediasi terkendala pada beberapa hal, yaitu :

---

<sup>31</sup> Suyud Margono, 2000, *Alternative Dispute resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 59.

Kurang kooperatifnya para pihak yang berperkara untuk dilakukan pemeriksaan terkait kelengkapan Berkas Perkara. Para pihak beranggapan bahwa apabila telah diselesaikan secara kekeluargaan maka kasus tersebut dianggap sudah selesai, padahal sebenarnya penyidik tetap memerlukan keterangan mereka sebagai kelengkapan Berkas Perkara. Kemudian mekanisme mediasi juga belum ada kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang mengatur hal tersebut<sup>32</sup>.

Selain itu, Sigit menyatakan bahwa :

Pelaksanaan mediasi pada kasus kecelakaan lalu lintas terkadang terhambat dengan kemauan korban yang tetap ingin agar kasusnya dilanjutkan ke tahap selanjutnya serta tidak ingin menyelesaikannya secara musyawarah. Untuk hal seperti ini maka penyidik tidak dapat menyelesaikannya melalui mediasi penal karena syarat adanya kesepakatan kedua pihak belum terpenuhi<sup>33</sup>.

Adanya hal tersebut di atas maka mekanisme mediasi yang dilakukan dengan cara bermusyawarah tidak dapat dilakukan karena para pihak belum menemukan kesepakatan, yang mana hal tersebut merupakan dasar dilakukannya mekanisme penyelesaian perkara lalu lintas di luar pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaku juga merupakan faktor yang mempengaruhi tercapainya penyelesaian perkara di luar pengadilan, karena apabila pelaku tidak kooperatif dengan tidak mengakui perbuatannya maka hal tersebut juga dapat menghambat mekanisme penyelesaian tersebut.

Dasar kewenangan kepolisian untuk melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan adalah diskresi, maka terkadang dalam penerapannya pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian juga

---

<sup>32</sup> Wawancara Yunanto, Kanit Lantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 12 Januari, Pukul 11.15 WIB.

<sup>33</sup> Wawancara Sigit, Kasat Lantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 12 Januari, Pukul 13.15 WIB.

menimbulkan perbedaan persepsi karena belum adanya dasar hukum yang jelas untuk mengatur hal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, yang mana merupakan hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara lalu lintas di luar pengadilan sebagai penyelesaian alternatif, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Faktor Internal, yaitu faktor yang timbul dari internal penegak hukum yaitu kepolisian, yang menghambat dalam penerapan penyelesaian perkara di luar pengadilan, seperti yang dinyatakan Yunanto bahwa :

Hambatan dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan adalah keraguan yang dialami setiap anggota kepolisian karena belum adanya payung hukum yang mengatur secara spesifik terkait dengan mekanisme mediasi tersebut<sup>34</sup>.

Adanya hal tersebut yaitu keraguan dalam menerapkan mediasi pada perkara tindak pidana, karena belum adanya peraturan yang mengatur secara jelas mengenai mediasi, yang mana hal tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh kepolisian. Perbedaan pemahaman dan sudut pandang dalam menerapkan mediasi kepada pelaku maupun korban, antara anggota kepolisian yang melakukan gelar perkara tersebut.

2. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang timbul dari dari luar kepolisian, yang mempengaruhi penyelesaian perkara lalu lintas di luar pengadilan.

---

<sup>34</sup> Wawancara Yunanto, Kanit Lantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 12 Januari, Pukul 11.15 WIB.

Faktor eksternal berasal dari korban dan pelaku perkara kecelakaan lalu lintas, seperti yang dinyatakan Sigit bahwa :

Tidak semua korban kecelakaan lalu lintas mau untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui mekanisme mediasi, karena merasa tidak mendapatkan keadilan dari pihak pelaku<sup>35</sup>.

Adanya korban kecelakaan lalu lintas yang tidak bersedia diselesaikan melalui mekanisme mediasi dan tetap menuntut agar kasus tersebut tetap dilanjutkan ke tahap selanjutnya merupakan hambatan dalam penerapan mekanisme mediasi tersebut. Selain itu pelaku yang tidak kooperatif dalam pelaksanaan penyidikan sehingga dapat menghambat mekanisme penyelesaian perkara lalu lintas di luar pengadilan, sehingga tidak tercapainya kesepakatan antara korban dan pelaku.

Kedua faktor tersebut di atas, baik internal maupun eksternal juga dapat menghambat dalam penerapan penyelesaian perkara lalu lintas di luar pengadilan, sebagai alternatif penyelesaian yang dilakukan oleh Satlantas Polrestabes Semarang.

---

<sup>35</sup> Wawancara Sigit, Kasat Lantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 12 Januari, Pukul 13.15 WIB.